



DINAS SOSIAL
Pemerintah Provinsi Gorontalo

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ini dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program-program pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024 berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam rangka menuju GORONTALO YANG HANDAL.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan.

Gorontalo, Juli 2023

 PIt. Kepala Dinas

Iswarta, SE. Ak.
196402071985031016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	43
3.3 Program dan Kegiatan	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	64
BAB V PENUTUP	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Povinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah dokumen rencana tahunan yang mempunyai arti strategis dalam mendukung pelaksanaan program tahunan Pemerintah Daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi Gorontalo.
2. Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan acuan untuk mengusulkan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada tahun 2024.

Mengingat Renja sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik dan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai Rencana Kerja yang mempunyai arti strategis dalam pembangunan daerah, secara umum Dinas Sosial diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam 1 (satu) tahun ke depan.
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Selain itu, Renja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo merupakan salah satu perangkat dasar untuk tercapainya pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023 disusun atas dasar mandat dan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pencanaan Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15);
19. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 22).
20. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 22);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut dari Program Dinas yang tertuang dalam Rencana Strategis dan sebagai acuan dalam perencanaan dan evaluasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk Tahun 2024.

Di samping itu rencana kerja Perangkat Daerah disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026,
2. Sebagai pelaksanaan teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah,
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan,
4. Sebagai instrument dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Bab ini memberi ulasan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Dinas Sosial, serta berisikan Program dan Kegiatan Dinas.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo serta rencana anggaran yang dibutuhkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi yang dapat diidentifikasi dengan 2 hal, yaitu sejauh mana proses perencanaan program/kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan program/kegiatan tersebut. Hasil evaluasi sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan program/kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2023. Hasil tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana kerja Dinas Sosial berikutnya tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung, yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Wajib dan Belanja Langsung Urusan Pilihan.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C. 29 berikut ini.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Gorontalo

Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja (n-2)	Realisasi Renja tahun (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1.06.01	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	<i>Persentase (%) layanan administrasi, sarana prasarana, SDM aparatur dan perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
1.06.01.1.01	<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, monev dan pelaporan yang dihasilkan</i>	10 lap	100 %	2 lap	2 lap	100 %	8 dok	8 dok	100 %
1.06.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase (%) kesesuaian laporan keuangan</i>	3 lap	100 %	1 lap	1 lap	100 %	100 %		
1.06.01.1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase (%) pengembangan pegawai yang sesuai kompetensi</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
1.06.01.1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase (%) sarana dan prasarana yang tersedia</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
1.06.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah</i>	100 %	100 %	1 pkt	1 pkt	100 %	2 pkt	2 pkt	100 %
1.06.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
1.06.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase (%) PSKS perorangan yang diberdayakan, Persentase (%) kelembagaan sosial yang diberdayakan, Persentase (%) penyelenggaraan UGB/PUB yang tertib aturan						100 %		
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi PUB dan UGB	12 pelaku usaha	12 pelaku usaha	12 pelaku usaha/ lembaga	5 usaha usaha/ lembaga	41,67 %	12 pelaku usaha		
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah PSKS perorangan yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	77 org	77 org	77 org	77 org	100 %	77 org	77 Org	
		Jumlah kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	40 organisasi	17 organisasi	20 lembaga	20 lembaga	100 %	41 lembaga		
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani								
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah pekerja migran Korban Tindak Kekerasan yang dilayani	50 org	12 org	25 org	15 org	60 %	15 org		
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Pesertanse (%) anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandang dan pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial dasar di dalam panti						100 %		
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial	345 org	46 org	68 org	32 org	47 %	25 org		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06.04.1.01.02	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	10 org		
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	345 org	46 org	68 org	32 org	47 %	15 org		
1.06.04.1.01.12	Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	2 dok		
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah PMKS Anak Terlantar yang memperoleh pendampingan layanan sosial	46 LKSA	78 %	35 org	36 org	102 %	45 org		
1.06.04.1.02.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	46 LKSA	78 %	35 org	36 org	102 %	45 org		
1.06.04.1.02.13	Koordinasi, sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	2 dok	100 %	2 dok	2 dok	100 %	2 dok		
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut usia Terlantar yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial	23 org	23 org	23 org	23 org	100 %	23 org	23 org	100 %
1.06.04.1.03.01	Penyediaan permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			23 org	23 org	100 %	23 org	23 org	
1.06.04.1.03.02	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	23 org	23 org	
1.06.04.1.03.03	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	23 org	23 org	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	23 org	23 org	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	23 org	23 org	
1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	23 org	23 org	23 org	23 org	100 %	23 org	23 org	
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	-	-	5 org	4 org	80 %	4 org	2 org	
1.06.04.1.03.13	Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	1 dok		
1.06.04.1.05	<i>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</i>	<i>Jumlah dokumen rehabilitasi sosial PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza</i>	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %
1.06.04.1.05.12	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %
1.06.05	<i>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</i>	Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, Persentase (%) Keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya, Persentase (%) fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan.		100 %			100 %			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06.05.1.02	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</i>	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	90.270 KPM	90.270 KPM	45.500 KPM	45.500 KPM	100%	12.091 keluarga	11.463 keluarga	57,84 %
1.06.05.1.02.01	<i>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</i>	jumlah rumah tangga yang mendapatkan jaminan sosial	90.000 KPM	90.000 KPM	45.000 KPM	45.000 KPM	100 %	10.000 KPM	10.000 KPM	37,5 %
1.06.05.1.02.02	<i>Pengolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kab/Kota</i>	jumlah KK miskin di Daerah Kab/Kota yang memperoleh penanganan sosial	270 kk	270 kk	500 KK	500 kk	100 %	2.091 KK	1.463 KK	70 %
1.06.06	<i>Program Penanganan Bencana</i>	<i>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani dan terlayani</i>	29 KK	29 kk	29 KK	29 kk	100 %	1.500 org		
1.06.06.1.01	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</i>	<i>Jumlah warga negara korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya masa tanggap darurat</i>	29 KK	29 kk	29 KK	29 kk	100 %	1.500 org		
1.06.06.1.01.01	<i>Penyediaan Permakanan</i>	<i>Jumlah warga negara korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya masa tanggap darurat</i>	-	-	-	-	-	1.500 org		
1.06.06.hasi1.01.02	<i>Penyediaan sandang</i>	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	1.500 org		
1.06.06.1.01.03	<i>Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi</i>	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	1 unit		
1.06.06.1.01.04	<i>Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</i>	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	200 org		
1.06.06.1.01.05	<i>Pelayanan Dukungan Psikososial</i>	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	29 KK	29 kk	29 KK	29 kk	100 %	300 org		

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.06.07	<i>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</i>	<i>Persentase Taman Makam Pahlawan yang meningkat peran dan fungsinya dalam Penanaman dan pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial</i>	87 org	100 %	67 org	67 org	100 %	2 makam		
<i>1.06.07.1.01</i>	<i>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>	<i>Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola</i>	87 org	100 %	67 org	67 org	100 %	2 makam		
<i>1.06.07.1.01.01</i>	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	-	-	-	-	2 dok		
<i>1.06.07.1.01.02</i>	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah makam yang terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	87 org	100 %	67 org	67 org	100 %	2 makam		

Pada Tabel 2.1 menunjukkan hasil capaian renstra dan renja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Adapun capaian renja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo cukup baik meskipun terdapat beberapa capaian kinerja kurang optimal tidak sesuai target, namun ada pula yang capaian kinerjanya melampaui target.

Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melaksanakan 7 program yang terdiri dari 1 (satu) program yang bersifat penunjang dan 6 program yang inti yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Dari 6 program inti tersebut terdapat 2 program pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial, yaitu Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan bencana. Adapun kegiatan SPM yang dilaksanakan pada Program Rehabilitasi Sosial, meliputi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti dan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti. Pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial khususnya Program Rehabilitasi Sosial terkendala dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana pelayanan berupa panti sosial milik pemerintah provinsi. Namun demikian hal ini masih bisa diatasi oleh Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pada tahun 2023 dilaksanakan melalui Griya Janati dengan jumlah penerima pelayanan sosial sebanyak 23 orang. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pada tahun 2023 diberikan kepada 45 orang anak terlantar yang ada di panti milik masyarakat, sedangkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti diberikan kepada penyandang disabilitas yang berada di SLB sebanyak 10 orang dan sebagian kepada penyandang disabilitas di luar panti yang memang benar-benar membutuhkan terutama alat bantu.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan capaian pelaksanaannya melampaui target yaitu pada Program Perlindungan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Sub Kegiatan

Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota dimana target dalam renstra sebanyak 500 KK, naik menjadi 2.091 KK yang terdiri dari 1.463 KK fakir miskin dan 628 perempuan miskin yang menjadi kepala keluarga. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan ini diantaranya adanya perhatian yang besar dari Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap program pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo sehingga target kegiatan biasa dinaikkan menjadi 2.091 KK.

Adapun pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial Keluarga apabila dilihat dari target capaian tahun sebelumnya, pada Tahun 2023 seperti mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 45.000 kPM menjadi 10.000 KPM. Namun tidak demikian, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin berupa bantuan pangan mengalami peningkatan kualitas pelayanannya, dimana yang sebelumnya KPM penerima bantuan pangan hanya sekali dalam satu tahun, namun pada tahun 2023 KPM menerima bantuan sebanyak 4 kali dalam setahun.

Pada Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan, pada tahun 2022 dari target 25 orang, terealisasi sebanyak 7 orang atau 28 %. Salah satu sebab tidak tercapainya target adalah karena kejadian yang dapat diprediksi. Dalam hal ini yang menjadi kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah orang yang kehabisan atau kehilangan bekal dalam perjalanan.

Pada kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi Tahun 2022 dari target 12 pelaku usaha yang melakukan undian gratis berhadiah dan atau pengumpulan uang dan atau barang terealisasi 50 %. Salah satu faktor penyebab sehingga capaian kegiatan tidak maksimal salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha, disamping itu juga adanya pajak penyelenggara undian sebagai salah satu persyaratan yang dirasakan membebani membebani para pelaku usaha yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah.

Pada Tahun 2022 kegiatan Pemebrdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, dari target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai 100 %, namun dalam pelaksanaan kegiatan berupa bantuan tali asih TKSM yang dalam hal ini diberikan kepada TKSK . Adapun pemberdayaan sosial yang bersifat kelembagaan seperti Karang Taruna dan WKSBM diberikan bantuan sosial sedangkan untuk peningkatan kapasitas pada tahun 2022 belum dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial, belum memiliki tolok ukur yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja sesuai dengan pedoman yang ada yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK) . Hal ini disebabkan karena Dinas Sosial belum sepenuhnya menerapkan Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan tolok ukur pelayanan kinerja. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo adalah belum tersedianya panti rehabilitasi sosial.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel T-C.30 berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Provinsi Gorontalo

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025(thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti			35 LKSA	30 org	30 org	30 org	36 LKSA	45 org	30 org	30 org	
2	Jumlah Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti			23 org	23 org	25 org	27 org	23 org	23 org	23 org	23 org	
3	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti			68 org	10 org	10 org	12 org	32 org	15 org	10 org	12 org	
4	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani dan terlayani			29 org	1.500 org	1.500 org	1.500 org	29 org	0	1.500 org	1.500 org	

Pencapaian pelayanan kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana dalam Tabel 2.2, dalam pemenuhan Stantar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik dari tahun sebelumnya. Pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pada tahun 2023 adalah dengan memberikan penyediaan permakanaan bagi 45 anak di LKSA milik masyarakat.

Pemenuhan SPM pada Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Tahun 2023 dengan target 23 orang meliputi penyediaan permakanaan, penyediaan sandang, penyediaan asrama yang mudah diakses, penyediaan perbekalan kesehatan, pemberian bimbingan fisik mental spiritual dan sosial, pemulasaraan dan kegiatan penunjang. Pemenuhan SPM pada kegiatan ini dilaksanakan melalui panti Griya Janati yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dengan capaian kinerja pelayanan sampai dengan triwulan II sebesar 90 %.

Pemenuhan SPM pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti Tahun 2023 diberikan dalam bentuk penyediaan sandang bagi 10 orang yang ada di SLB dan alat bantu bagi 15 orang penyandang disabilitas di luar panti. Kendala dalam pemenuhan SPM penyandang disabilitas ini adalah tidak tersedia panti sosial baik milik pemerintah maupun milik masyarakat serta terbatasnya SDM yang ada. Adapun capaian kinerja pelayanan sampai dengan triwulan II sebesar 1,82 %.

Pemenuhan SPM pada Penanganan Korban Bencana meliputi penyediaan permakanaan bagi 1.500 orang, penyediaan sandang bagi 1.500 orang, penyediaan tempat pengungsian sebanyak 1 unit, penanganan khusus bagi kelompok rentan bagi 200 orang, dan pelayanan dukungan psikososial bagi 300 orang. Adapun capaian kinerja pelayanan sampai dengan triwulan II sebesar 0 % karena belum terjadi bencana.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perlindungan sosial merupakan konsep yang luas yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan usaha perluasan perlindungan sosial. Melalui kebijakan perlindungan sosial, pemerintah pusat maupun daerah berusaha menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses atas pelayanan sosial bagi seluruh penduduk. Cakupan dalam kebijakan pendekatan perlindungan sosial diantaranya meliputi penjaminan keamanan pendapatan pokok, yang dapat berbentuk bantuan dan jaminan sosial seperti dana pensiun bagi penduduk lanjut usia serta penyandang disabilitas, jaminan pekerjaan dan layanan, bagipengangguran dan penduduk miskin.

Secara umum perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. (Bappenas, 2014). Perlindungan sosial juga menjadi salah satu instrument penting untuk mewujudkan pemenuhan target dalam Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini menjadi isu strategis dalam SDG's/TPB sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan secara nasional dalam perlindungan sosial.

Berbagai kendala ditemukan pada pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial, diantaranya sering ditemukan di lapangan bahwa sasaran penerima manfaat belum tepat. Hal ini terkadang disebabkan oleh kurangnya koordinasi anatra instansi terkait. Meskipun pemerintah telah menyediakan system terkait data sasaran, namun ketidakakuratan data dan kelengkapan betrkas data menjadikan data tersebut ada yang menjadi kurang valid. Selain itu kendala pelayanan di lapangan juga sering dikeluhkan oleh masyarakat selain jenis bantuan yang belum sesuai dengan harapan.

Dari uraian diatas, maka itu isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Sosial pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan perlindungan sosial yang meliputi penjaminan keamanan pendapatan pokok yang dapat berbentuk bantuan dan jaminan sosial, seperti dana pensiun bagi lanjut usia serta penyandang disabilitas, tunjangan bantuan penghasilan, jaminan pekerjaan, serta layanan bagi pengangguran dan penduduk miskin. Kebijakan perlindungan sosial juga mencakup penyediaan akses universal akan pelayanan sosial yang terjangkau dalam bidang kesehatan, pendidikan, layanan dasar seperti ketahanan pangan dan sebagainya.

Perlindungan sosial belum menjangkau semua kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial termasuk kelompok khusus seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas yang rentan miskin.

- b. Berbagai kendala ditemukan pada pelaksanaan perlindungan sosial di lapangan seperti ditemukannya sasaran penerima manfaat yang belum tepat. Hal ini terkadang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Meskipun pemerintah telah menyediakan system terkait data sasaran, namun ketidakakuratan data dan kelengkapan berkas dapat menjadikan data yang ada menjadi kurang valid. Kendala di lapangan juga sering dikeluhkan oleh masyarakat selain jenis bantuan yang belum sesuai dengan harapan. Hal ini juga dapat menyebabkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kurang optimal.

- c. Kapasitas dan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, terdapat empat sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial. Peran pekerja sosial profesional dan relawan sosial yang berasal dari masyarakat memiliki kontribusi terhadap keberhasilan program perlindungan sosial. Namun begitu hal ini tidak diiringi oleh peningkatan kemampuan para pekerja sosial. Peningkatan kemampuan yang diberikan kepada para pekerja sosial sosial dirasakan masih kurang dan tidak

berimbang dengan peran-peran yang dilakukan, sehingga kualitas pendampingan program tidak berjalan dengan baik.

Informasi dan pemahaman dari para pihak terkait mengenai pendampingan program juga menjadi persoalan yang berdampak pada fasilitasi program di tingkat daerah.

- d. Koordinasi dan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan perlindungan sosial belum terintegrasi serta prioritas pendanaan yang masih terbatas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada Tahun 2024.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 bahwa Dinas Sosial Provinsi Gorontalo bertanggungjawab atas terwujudnya perlindungan sosial bagi masyarakat dimana pada RKPD tersebut telah ditentukan besaran anggaran Pagu Indikatif untuk Belanja Langsung Urusan Wajib pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

Adapun pagu indikatif dalam Rancangan Awal RKPD 2024, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo memperoleh anggaran sebesar Rp. 31.280.676.517,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah) untuk belanja langsung yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Peruntukan Belanja Langsung tersebut ialah untuk membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Urusan Wajib Sosial).

Melihat usulan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terkait anggaran yang dibutuhkan guna pencapaian target RPD Provinsi Gorontalo dan usulan Rakortekbang Provinsi Gorontalo maka anggaran tersebut telah cukup memadai.

Rancangan awal RKPD telah sesuai dengan kebutuhan anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagaimana pada tabel T-C.31 berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi Gorontalo

Dinas Sosial

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									31.280.676	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Persentase (%) layanan administrasi, sarana prasarana, SDM aparatur dan perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi	100 %	11.666.195	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Persentase (%) layanan administrasi, sarana prasarana, SDM aparatur dan perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi	100 %	11.666.195	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 dok	838.055	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 dok	838.055	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase (%) kesesuaian laporan keuangan	100 %	8.742.839	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase (%) kesesuaian laporan keuangan	100 %	8.742.839	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase (%) pengembangan pegawai yang sesuai kompetensi	100 %	196.340	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase (%) pengembangan pegawai yang sesuai kompetensi	100 %	196.340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase (%) sarana dan prasarana yang tersedia	100 %	343.122	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase (%) sarana dan prasarana yang tersedia	100 %	343.122	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Jumlah pengadaan barang milik daerah	1 pkt	10.300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Jumlah pengadaan barang milik daerah	1 pkt	10.300	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Persentase penyediaan jasa penunjang	100 %	654.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Persentase penyediaan jasa penunjang	100 %	654.900	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	880.638	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	880.638	
	Program Pemberdayaan Sosial	Provinsi	Persentase (%) PSKS perorangan yang diberdayakan	100 %	544.600	Program Pemberdayaan Sosial	Provinsi	Persentase (%) PSKS perorangan yang diberdayakan	100 %	544.600	
			Persentase (%) kelembagaan sosial yang diberdayakan	100 %	816.786			Persentase (%) kelembagaan sosial yang diberdayakan	100 %	816.786	
			Persentase (%) penyelenggaraan UGB/PUB yang tertib aturan	100 %	78.041			Persentase (%) penyelenggaraan UGB/PUB yang tertib aturan	100 %	78.041	
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi	Jumlah rekomendasi PUB dan UGB	12 dok	78.041	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi	Jumlah rekomendasi PUB dan UGB	12 dok	78.041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Provinsi	Jumlah PSKS perorangan yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	122 org	544.600	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Provinsi	Jumlah PSKS perorangan yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	122 org	544.600	
		Provinsi	Jumlah kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 lembaga	816.786		Provinsi	Jumlah kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 lembaga	816.786	
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Provinsi	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	16 org	139.440	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Provinsi	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	16 org	139.440	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Provinsi	Jumlah pekerja migran Korban Tindak Kekerasan yang dilayani	16 org	139.440	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Provinsi	Jumlah pekerja migran Korban Tindak Kekerasan yang dilayani	16 org	139.440	
	Program Rehabilitasi Sosial	Provinsi	Persentase (%) anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas dan gelandangan dan pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial di dalam panti	100 %	3.472.918	Program Rehabilitasi Sosial	Provinsi	Persentase (%) anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas dan gelandangan dan pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial di dalam panti	100 %	3.472.918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di dalam Panti	Provinsi	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	10 org	716.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di dalam Panti	Provinsi	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	10 org	716.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Provinsi	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	30 org	1.059.780	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Provinsi	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	30 org	1.059.780	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam panti	Provinsi	Jumlah Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	23 org	1.216.937	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam panti	Provinsi	Jumlah Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	23 org	1.216.937	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Provinsi	Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza meningkat keberfungsian sosialnya	1 dok	480.200	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Provinsi	Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza meningkat keberfungsian sosialnya	1 dok	480.200	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	10.000 KPM	8.972.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	10.000 KPM	8.972.000	
			Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya	1.000 keluarga	3.500.000			Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya	1.000 keluarga	3.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan	20 org	130.000			Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan	20 org	130.000	
	Program Penanganan Bencana		Jumlah korban bencana dan sosial yang terlayani dan tertangani	1.700 orang	1.145.000	Program Penanganan Bencana	Provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani dan terlayani	1.700 orang	1.145.000	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Provinsi	Jumlah warga negara korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya masa tanggap darurat	1.700 orang	1.145.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Provinsi	Jumlah warga negara korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya masa tanggap darurat	1.700 orang	1.145.000	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan yang meningkat peran dan fungsinya dalam Penanaman dan pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	100 %	765.694	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Provinsi	Persentase Taman Makam Pahlawan yang meningkat peran dan fungsinya dalam Penanaman dan pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	100 %	765.694	
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola	2 TMP/MPN	765.694.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola	2 TMP/MPN	765.694.	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diera reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara top down akan tetapi juga secara bottom up artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses musrenbang, sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pada Tahun 2023 tentunya Dinas Sosial Provinsi Gorontalo juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para stakeholders. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial Provinsi Gorontalo perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran yang diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Disamping itu juga memperhatikan program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terkait rencana pencapaian target RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat pada tahun 2024. Daftar usulan stakeholder yang diakomodir dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel 2.5 berikut :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Gorontalo

Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
A	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	500 pkt	Diterima, mealalui bantuan pangan, apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi dg data BNBA, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia
		Desa hungayonaa kec. Tilamuta, Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	10 org	Diterima, mealalui bantuan pangan, apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi dg data BNBA, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia
2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	300 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia.
		se-Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	50 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Desa Karya Baru Kec. Paguat, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	2 unit	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bukan dalam bentuk barang
		Se Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	20 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Tersebar se-Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten Kota	100 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia

1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Se - Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten Kota	25 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Se- Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten Kota	2 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Se-Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten Kota	50 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		se-Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten Kota	10 unit	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bukan dalam bentuk barang
		semua desa kab gorontalo utara, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten Kota	100	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		semua desa kab gorontalo , Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten Kota	500	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		semua desa kab gorontalo , Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten Kota	200	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		semua desa kab bone bolango, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten Kota	200 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		semua desa kab bone bolango, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten Kota	200 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia

1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Paguat, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten Kota	1 klp	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.
		Kec. Randangan, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten Kota	1 klp	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.
		Kec. Wonggarasi, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten Kota	1 klp	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.
		Kec. Duhiadaa, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	1 klp	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.
		Kec. Paguyaman, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	1 klp	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.
		Kec. Popayato, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	1 klp	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.
		Kec. Patilanggio, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	1 klp	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.
		Se Kabupaten Gorontalo, Prov. Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	50 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia

1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Se Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	50 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Se Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	500 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.
		Se Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Tersebar di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	300 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		tersebar se Kab. Boalemo & Pohuwato, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	300 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.
		tersebar se Kab. Boalemo & Pohuwato, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	300 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	50 pkt	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		tersebar se Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	200 KPM	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	150 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		ilotunggula, tolinggula, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	10 klp	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.
		Tolinggula Tengah, Tolinggula, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	10 klp	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.

1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Se Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	150 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Se - Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	50 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Se Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	150 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		kec. Telaga, Telaga Biru, Telaga Jaya, Tilango, Limboto, Limboto Barat, Batudaa, Batudaa Pantai, Tabongo, Bongomeme, Dungaliyo, Biluhu, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	200 KPM	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Desa Botumoito Kec. Botumoito, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	200 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Desa Tabulo Kec. Mananggu, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	20 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Kecamatan Mootilango, Asparaga, Tolangohula, Boliyohuto, Pulubala, Bilato, Tibawa, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	1 klp	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.
		Se Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	150 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Se - Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	50 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Se Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	150 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia

1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	kec. Telaga, Telaga Biru, Telaga Jaya, Tilango, Limboto, Limboto Barat, Batudaa, Batudaa Pantai, Tabongo, Bongomeme, Dungaliyo, Biluhu, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	200 KPM	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Desa Botumoito Kec. Botumoito, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	200 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Desa Tabulo Kec. Manangu, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	20 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Desa Pohuwato timur kec. marisa , Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	5 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Desa Taluduyunu Kec. Buntulia, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	5 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Desa Milangodaa Kec. Popayato timur, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	20 pkt	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.
		dusun sentral, Kec.Isimu Raya, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	1 pkt	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.
		Isimu Induk, Dusun Sentral, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	1 pkt	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.
		Isimu Induk, Dusun Sentral, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	1 pkt	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.

1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	150 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Desa Hutamonu, Kec. Botumoito., Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	10 klp	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.
		Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	50 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Se-Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	25 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Kelurahan Tomulobutao selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	16 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Se-Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	30 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Se-Kab. Gorontalo , Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100 meter	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia, bantuan bersifat perorangan.
		Se Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	20 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Se - Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	50 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Se-Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	40 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Se-Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	60 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Desa Bendungan Kec. Manangu, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	10 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia

1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	50 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	30 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Tersebar dikabupaten gorontalo utara, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	200 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Tersebar Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	50 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Tersebar dikabupaten gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	200 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		Tersebar se-Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	50 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
		tersebar se kab. boalemo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	50 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan, agar dilengkapi data BNBA, dan disesuaikan dengan pagu yang tersedia
II	Program Pemberdayaan Sosial				
A	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		Jumlah kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		
1	Peningkatan Kamampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 klp	Diterima apabila memenuhi persyaratan, dilengkapi data BNBA serta proposal, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Bantuan diberikan kepada lembaga (KT)
		Desa Karya Baru Kec. Paguat, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	2 KT	Diterima apabila memenuhi persyaratan, dilengkapi data BNBA serta proposal, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Bantuan diberikan kepada lembaga (KT)

1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kamampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Se- Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	25 desa	Diterima apabila memenuhi persyaratan,dilengkapi data BNBA serta proposal, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Bantuan diberikan kepada lembaga (KT)
		SE KABUPATEN BONE BOLANGO, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	20 org	Diterima apabila memenuhi persyaratan,dilengkapi data BNBA serta proposal, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Bantuan diberikan kepada lembaga (KT)
		semua desa kab gorontalo utara, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	5	Diterima apabila memenuhi persyaratan,dilengkapi data BNBA serta proposal, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Bantuan diberikan kepada lembaga (KT)
		semua desa kab gorontalo , Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10	Diterima apabila memenuhi persyaratan,dilengkapi data BNBA serta proposal, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Bantuan diberikan kepada lembaga (KT)
		Desa Huidu Utara Kecamatan Limboto Barat, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 klp	Diterima apabila memenuhi persyaratan,dilengkapi data BNBA serta proposal, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Bantuan diberikan kepada lembaga (KT)
		Desa Hunto Kecamatan Popayato Timur, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 klp	Diterima apabila memenuhi persyaratan,dilengkapi data BNBA serta proposal, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Bantuan diberikan kepada lembaga (KT)
		Desa Dulomo Kec. Patilanggio, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 klp	Diterima apabila memenuhi persyaratan,dilengkapi data BNBA serta proposal, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Bantuan diberikan kepada lembaga (KT)

1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kamampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Desa Karya Baru Kec. Paguat, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	2 KT	Diterima apabila memenuhi persyaratan, dilengkapi data BNBA serta proposal, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Bantuan diberikan kepada lembaga (KT)
		Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 organisasi	Diterima apabila memenuhi persyaratan, dilengkapi data BNBA serta proposal, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Bantuan diberikan kepada lembaga (KT)
		tersebar se kab. boalemo dan pohuwato, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 KT	Diterima apabila memenuhi persyaratan, dilengkapi data BNBA serta proposal, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Bantuan diberikan kepada lembaga (KT)
		SE KABUPATEN BONE BOLANGO, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	35 Rukun Duka	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		SE KOTA GORONTALO, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Rukun Duka	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		DESA MALEO KEC. PAGUAT, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	2 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		DESA BUMBULAN KEC. PAGUAT, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	2 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		DESA BUNUYO, KEC. PAGUAT, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	2 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		DESA BUHU JAYA, KEC. PAGUAT, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	2 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .

1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kamampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	KEC. DUHIADAA, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	2 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		KEC. PATILANGGIO, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	2 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		Tersebar di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	500 org/Rukun duka	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		Desa Bongo Nol Kec. Paguyaman, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		SE Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	5 pkt	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		SE Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	20 pkt	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		Se Kab.Gorontalo , Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		Desa Dulomo Kec. Patilanggio, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .

1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kamampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Desa Bendungan Kec. Manangu, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		Tersebar di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	300 org	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		Desa bunuyo kec.paguat dan desa popaya kec. Dengilo kab. Pohuwato, provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 pkt	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		Desa padengo kecamatan dengilo kab. Pohuwato, provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 pkt	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		Tersebar di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	500 org	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		Tersebar di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	500 org	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		Desa Paris, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 pemohon	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		Desa Paris, Kecamatan Mootilango, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		tersebar se Kab. Boalemo & Pohuwato, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	5 rukun duka	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .

1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kamampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Desa Bendungan Kec. Mananggu, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		tersebar se kab boalemo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	75 KPM	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		tersebar di Kecamatan Mootilango, Asparaga, Tolangohula, Boliyohuto, Pulubala, Bilato, Tibawa,, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	50 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		Desa bilato, kec. Bilato, kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		tersebar di kec. Telaga, Telaga Biru, Telaga Jaya, Tilango, Limboto, Limboto Barat, Batudaa, Batudaa Pantai, Tabongo, Bongomeme, Dungaliyo, Biluhu, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	5 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
		Desa modelomo kec. Tilamuta, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 klp	Sesuai Kepmensos 42/HUK/2004 bahwa kewenangan provinsi adalah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring .
III	Program Rehabilitasi Sosial				
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pantii	KAB. GORONTALO, Provinsi Gorontalo	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didlam panti	1 org	Dilengkapi dengan data BNBA, akan dilakukan asistensi untuk menentukan jenis kebutuhannya
B	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pantii	DESA TIMBULO TENGAH, Provinsi Gorontalo	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didlam panti	15 org	Dilengkapi dengan data BNBA, akan dilakukan asistensi untuk menentukan jenis kebutuhannya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

1. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
2. Keterlantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab;
3. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
4. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;
5. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
6. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

1. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsisosial dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

3.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mendatang meliputi :

1. Pemenuhan hak sosial dasar masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

b. Sasaran.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Provinsi Gorontalo selang tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perlindungan sosial bagi masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1.	Pemenuhan hak sosial dasar masyarakat		Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	92 %
			Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial	23 %
		Perlindungan sosial bagi masyarakat	Persentase (%) warga miskin ekstrem yang mendapatkan perlindungan sosial	85 %
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Nilai SAKIP	BB
		Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerin tahan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	B
			Nilai Pembangunan Statistik	3
			Indeks Budaya Kerja	Belum bagus
			Nilai Pengelolaan Kearsipan	Sangat kurang

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang akan dilaksanakan, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain target RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, SDG's, pagu indikatif, lokasi kegiatan, SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050_5889 Tahun 2021 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Program :

Persentase (%) layanan administrasi, sarana prasarana, SDM aparatur serta perencanaan dan pelaporan.

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan :

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan.

Sub Kegiatan :

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- (4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan :

Persentase (%) kesesuaian laporan keuangan

Sub Kegiatan :

- (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- (2) Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
- (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan :

Persentase (%) pengembangan pegawai yang sesuai kompetensi

Sub Kegiatan :

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- (3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan :

Persentase (%) sarana dan prasarana yang tersedia

Sub Kegiatan :

- (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- (3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- (4) Penyediaan bahan logistik kantor
- (5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- (6) Penyediaan Bahan/Material
- (7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- (8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan :

Jumlah pengadaan barang milik daerah

Sub Kegiatan :

- (1) Pengadaan Meubel

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan :

Persentase (%) penyediaan jasa penunjang

Sub Kegiatan :

- (1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- (2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan :

Persentase pemeliharaan barang milik daerah

Sub Kegiatan :

- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- (3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- (4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- (5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pemberdayaan Sosial

Indikator Kinerja Program :

- Persentase PSKS yang perorangan yang diberdayakan
- Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan
- Persentase penyelenggaraan UGB/PUB yang tertib aturan

Kegiatan :

1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan :

Jumlah rekomendasi PUB dan UGB

Sub kegiatan :

Koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan :

- Jumlah PSKS perorangan yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Jumlah kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnyadalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Sub Kegiatan :

- (1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
- (2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
- (3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan SosialKelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi

C. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan

Indikator Kinerja Program :

Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani
Kegiatan :

1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

Indikator Kinerja Kegiatan :

Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani

Sub Kegiatan :

- (1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal.

D. Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Kinerja Program :

Persentase anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial dasarnya di dalam panti.

Kegiatan :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

Indikator Kinerja Kegiatan :

Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti

Sub Kegiatan :

- (1) Penyediaan permakanan
- (2) Akses ke Layanan Pendidikan dan Kebutuhan Dasar
- (3) Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti
- (4) Koordinasi , sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam panti

Indikator Kinerja Kegiatan :

Jumlah Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti

Sub Kegiatan :

- (1) Penyediaan permakanaan
- (2) Penyediaan sandang
- (3) Penyediaan asrama yang mudah diakses
- (4) Penyediaan alat bantu
- (5) Penyediaan perbekalan Kesehatan di dalam panti
- (6) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- (7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-hari
- (8) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- (9) Pemulasaraan
- (10) Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di dalam Panti

Indikator Kinerja Kegiatan :

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

Sub Kegiatan :

- (1) Penyediaan Permakanan
- (2) Penyediaan sandang
- (3) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- (4) Penyediaan Alat Bantu
- (5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
- (6) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- (7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-hari
- (8) Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

Indikator Kinerja Kegiatan :

Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza meningkat keberfungsian sosialnya

Sub Kegiatan :

Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA

E. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator Kinerja Program :

1. Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang Meningkatkan aksesnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar
2. Persentase (%) Keluarga Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Produktifitas dan Sosial Ekonominya
3. Persentase (%) Fakir Miskin yang mampu Mengembangkan Bantuan Stimulan

Kegiatan :

1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

Indikator Kinerja Kegiatan :

Jumlah rekomendasi pengangkatan anak antar WNI

Sub Kegiatan :

Pengangkatan Anak antar WNI

2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan :

Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam menerima pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkat produktifitas sosial ekonominya

Sub Kegiatan :

- (1) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- (2) Pengelolaan Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota
- (3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

F. Program Penanganan Bencana

Indikator Kinerja Program :

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani dan terlayani
Kegiatan :

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan :

Jumlah warga negara korban bencana alam dan bencana sosial
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya masa tanggap darurat

Sub Kegiatan :

- (1) Penyediaan permakanan
- (2) Penyediaan sandang
- (3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- (4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- (5) Pelayanan Dukungan Psikososial

G. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Indikator Kinerja Program :

Persentase Taman Makam Pahlawan yang meningkat peran dan fungsinya dalam Penanaman dan pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

Kegiatan :

1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional

ProvinsiIndikator Kinerja Kegiatan :

Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang
dikelolaSub Kegiatan :

- (1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Gorontalo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.01	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	<i>Persentase (%) layanan administrasi, sarana prasarana, SDM aparatur dan perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi</i>	Provinsi	100 %	11.666.195.193	DAU		100 %	11.818.839.665
1.06.01.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan</i>	Provinsi	8 dok	838.055.012	DAU		8 dok	915.000.000
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	1 dok	599.002.362	DAU		1 dok	650.000.000
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi	1 dok	11.437.100	DAU		1 dok	15.000.000
1.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	5 lap	50.078.150	DAU		5 lap	60.000.000
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	3 laporan	177.537.400	DAU		1 dok	190.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Daerah	Persentase (%) kesesuaian laporan keuangan	Provinsi	100 %	8.742.839.661	DAU			8.748.839.665
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	71 org	8.742.839.661	DAU		71 org	8.748.839.665
1.06.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi	1 dok	95.000.000	DAU		1 dok	95.000.000
1.06.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	1 lap	24.000.000	DAU		1 lap	24.000.000
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) pengembangan pegawai yang sesuai kompetensi	Provinsi	100 %	196.340.000	DAU		100 %	261.860.000
1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi	1 pkt	28.400.000			71 pkt	46.860.000
1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi	2 org	111.180.000	DAU		4 org	150.000.000
1.06.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	71 org	56.760.000			71 org	65.000.000
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase (%) sarana dan prasarana yang tersedia	Provinsi	100 %	343.122.420	DAU		100 %	470.000.000
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi	1 paket	21.200.000	DAU		1 paket	25.000.000
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi	1 paket	85.680.000	DAU		1 paket	95.000.000
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi	1 paket	53.550.000	DAU		1 paket	65.000.000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.06.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	<i>Provinsi</i>	1 paket	36.557.420	<i>DAU</i>		1 paket	40.000.000
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi	1 paket	18.856.200	<i>DAU</i>		1 paket	20.000.000
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	<i>Provinsi</i>	1 paket	6.180.000	<i>DAU</i>		1 paket	15.000.000
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi	1 laporan	47.500.000	<i>DAU</i>		1 laporan	75.000.000
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Provinsi</i>	1 laporan	17.150.000	<i>DAU</i>		1 laporan	35.000.000
1.06.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi	1 dok	56.448.000	<i>DAU</i>		1 dokumen	100.000.000
1.06.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah</i>	<i>Provinsi</i>	<i>2 pkt</i>	<i>10.300.000</i>	<i>DAU</i>		<i>1 pkt</i>	<i>25.000.000</i>
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi	4 paket	10.300.00	<i>DAU</i>		1 pkt	25.000.000
1.06.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang</i>	<i>Provinsi</i>	<i>100 %</i>	<i>654.900.000</i>	<i>DAU</i>		<i>100 %</i>	<i>700.000.000</i>
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	<i>Provinsi</i>	3 laporan	187.800.000	<i>DAU</i>		3 laporan	2200.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi	1 laporan	467.100.000	DAU		1 laporan	480.000.000
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Provinsi	100 %	880.638.100	DAU		100 %	985.000.000
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi	1 unit	63.283.600	DAU		1 unit	70.000.000
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi	14 unit	461.630.000	DAU		14 unit	500.000.000
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi	55 unit	85.099.500	DAU		55 unit	90.000.000
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi	1 unit	161.625.000	DAU		1 unit	200.000.000
1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi	1 unit	109.000.000	DAU		1 unit	125.000.000
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase (%) PSKS perorangan yang diberdayakan /Persentase (%) kelembagaan sosial yang diberdayakan /Persentase (%) penyelenggaraan UGB/PUB yang tertib aturan	Provinsi	100 %	1.439.428.538	DAU		100 %	1.466.786.634
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi PUB dan UGB	Provinsi	12 dok	78.041.678	DAU		12 dok	100.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Provinsi	12 dok	78.041.678	DAU		12 dok	100.000.000
1.06.02.1.02	<i>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</i>	<i>Jumlah PSKS perorangan yang meningkat kapasitas</i>	Provinsi	137 org	544.600.226	DAU		122 org	550.000.000
		<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya</i>	Provinsi	53 lembaga	816.786.634			100 lembaga	816.786.634
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Provinsi	45 org	149.880.240	DAU		45 org	150.000.000
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Provinsi	77 org	394.719.986	DAU		77 org	400.000.000
1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Provinsi	100 lembaga	816.786.634	DAU		100 lembaga	816.786.634
1.06.03	<i>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan</i>	<i>Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani</i>	Provinsi	16 org	139.440.000	DAU		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.03.1.01	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</i>	<i>Jumlah pekerja migran Korban Tindak Kekerasan yang dilayani</i>	Provinsi	16 org	139.440.000	DAU		0	0
1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi	16 org	139.440.000	DAU		0	0
1.06.04	<i>Program Rehabilitasi Sosial</i>	<i>Persentase (%) anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas dan gelandangan, pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial dasar didalam panti</i>	100 %		3.472.918.200	DAU			4.096.630.700
1.06.04.1.01	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</i>	<i>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti</i>	Provinsi	10 org	716.000.000	DAU		12 org	910.000.000
1.06.04.1.01.01	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi	10 org	265.000.000	DAU		12 org	325.000.000
1.06.04.1.01.02	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi	10 org	40.000.000	DAU		12 org	70.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04.1.01.03	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi	10 org	214.000.000			12 org	250.000.000
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Provinsi	10 org	14.000.000			2 org	10.000.000
1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi	10 org	20.000.000			12 org	50.000.000
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi	10 org	30.000.000			12 org	60.000.000
1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi	10 org	73.000.000			12 org	75.000.000
1.06.04.1.01.12	Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Provinsi	2 dok	60.000.000	DAU		2 dok	70.000.000
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Provinsi	30 orang	1.059.780.700	DAU			1.121.430.700
1.06.04.1.02.01	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi	45 orang	573.350.000	DAU		30 org	590.000.000
1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kebutuhan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Provinsi	30 orang	40.054.000			30 org	45.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Provinsi	30 orang	51.800.000	DAU		0	0
1.06.04.1.02.13	Koordinasi , sinkronisasi dan Pembinaann Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Provinsi	2 dok	394.576.700			2 dok	486.430.700
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Provinsi	25 orang	1.216.937.500	DAU		23 org	1.485.000.000
1.06.04.1.03.01	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi	23 org	300.000.000	DAU		23 org	430.000.000
1.06.04.1.03.02	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi	23 org	100.000.000	DAU		23 org	110.000.000
1.06.04.1.03.03	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi	23 org	120.000.000	DAU		23 org	200.000.000
1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Provinsi	5 org	14.000.000	DAU		6 org	15.000.000
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi	23 org	60.000.000	DAU		23	75.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi	23 org	282.460.000	DAU		23 org	300.000.000
1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi	23 org	220.037.500	DAU		23 org	225.000.000
1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Provinsi	5 org	19.540.000	DAU		5 org	20.000.000
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Provinsi	4 org	20.000.000	DAU		4 org	20.000.000
1.06.04.1.03.13	Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Provinsi	2 dok	80.900.000	DAU		2 dok	90.000.000
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah dokumen rehabilitasi sosial PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza	Provinsi	1 dok	480.200.000	DAU		1 dok	580.200.000
1.06.04.1.05	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Provinsi	1 dok	480.200.000	DAU		1 dok	580.200.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Kabupaten/ Kota se Provinsi	100 %	12.652.000.000	DAU		100 %	12.790.000.000
		Persentase (%) Keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya							
		Persentase (%) fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan							
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang tua Tunggal	Jumlah rekomendasi pengangkatan anak antar WNI	Provinsi	20 rekomendasi	50.000.000	DAU		20 rekomendasi	50.000.000
1.06.05.1.01.01	Pengangkatan anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Provinsi	20 orang	50.000.000	DAU		20 orang	50.000.000
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkat produktifitas sosial dan ekonominya	Kabupaten/Kota	1520 Keluarga	12.602.000.000	DAU		11.020 Keluarga	12.740.000.000
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Kabupaten/Kota	10.000 Keluarga	8.972.000.000	DAU		10.000 Keluarga	9.100.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten./Kota	1.000 Keluarga	3.500.000.000	DAU		1.000 Keluarga	3.500.000.000
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Kabupaten./Kota	20 org	130.000.000	DAU		20 org	140.000.000
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Jumlah korban bencana dan sosial yang terlayani dan tertangani	Kabupaten/Kota	1.000 orang	1.145.000.000	DAU		1.700 org	1.625.000.000
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah warga negara korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya masa tanggap darurat	Kabupaten/Kota	1.000 orang	1.145.000.000	DAU		1.700 org	1.625.000.000
1.06.06.1.01.01	Penyediaan permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Darurat Kewenangan Provinsi	Kabupaten/Kota	1.000 orang	744.000.000	DAU		1.000 org	1.110.000.000
1.06.06.1.01.02	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Kabupaten/Kota	500 orang	150.000.000	DAU		500 org	170.000.000
1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Kabupaten/Kota	1 unit	120.175.000	DAU		1 unit	180.000.000
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Kabupaten/Kota	200 org	100.000.000	DAU		200 org	45.000.000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Kabupaten/Kota	300 org	30.000.000	DAU		300 org	45.000.000
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang meningkat peran dan fungsinya dalam penanaman dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	Provinsi	100 %	765.694.586	DAU		100 %	765.694.586
<i>1.06.07.1.01</i>	<i>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>	<i>Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola</i>	<i>Provinsi</i>	<i>2 makam</i>	<i>765.694.586</i>	<i>DAU</i>		<i>2 makam</i>	<i>765.694.586</i>
1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah makam yang terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Provinsi	2 makam	765.694.586	DAU		2 makam	765.694.586
J U M L A H					31.280.676.517				32.562.951.585

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja, pendanaan dan rincian atas target, pagu indikatif, dan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah berikut ini :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024 disusun sesuai dengan target yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan renja yang sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan rencana kerja maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan sub kegiatan yang memiliki prioritas paling sedikit dalam mendukung target IKU maupun IKK. Selain itu juga dapat dilakukan dengan penyesuaian target output kegiatan, akan tetapi tetap mempertimbangkan capaian target IKU maupun IKK tahunan dalam renstra.

Dalam penyusunan rencana kerja diperlukan kaidah yaitu seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkaitharus melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Setiap unsur perangkat daerah harus senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan. Diperlukan juga koordinasi yang baik antar unsur perangkat daerah untuk menyukseskan pelaksanaan renja 2024.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Memperkuat koordinasi antar unsur perangkat daerah dan stakeholder;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan lapangan, pembuatan laporan, rapat koordinasi berkala, pendampinganteknis dll;
4. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur kegiatan;
5. Memberikan reward dan punishment yang berkeadilan sesuai performa masing-masing.